

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan adanya suatu hasil atau manfaat yang di capai atau dihasilkan. Saat ini pemerintah telah meninggalkan konsep Anggaran Tradisional dan beralih ke *New Public Management* atau yang berorientasi pada kinerja bukan kebijakan.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengalokasian sumberdaya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.pemerintah daerah saat ini sudah memiliki kewenangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut

diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.

Setelah proses penganggaran tersebut selesai, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana caranya anggaran tersebut oses manajemen dilakukan oleh institusi secara konsisten dan terusmenerus. Proses tersebut dilaksanakan oleh institusi yang bergerak dalam kegiatan yang berorientasi laba atau nirlaba. Instasi yang bersangkutan. dalam kegiatan nirlaba juga melakukan proses manajemen. Instasi dituntut untuk melaksanakan proses manajemen yang optimal. Hal ini sejalan dengan konsepsi instasi yang telah dibentuk dalam manajemen instasi untuk instasitidak dapat terjadi tanpa melibatkan sumber daya yang tepat. Manajemen instansi yang baik melibatkan seluruh elemen dalam instansi. Elemen yang dimaksud seperti pimpinan instansi, staf dan lain-lain.

Sebagai penunjang kegiatan manajemen, instansimemerlukan uang untuk melaksanakan rencana instansi yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Uang yang beredar dalam instansi sudah sepatutnya dikelola dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah bahwa pengelolaan uang adalah pengelolaan kas dan surat berharga termasuk menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa pengendalian internal dan pengawas fungsional daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengendalian fungsional.instansi memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang beredar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengelolaan keuangan instansi yang optimal memaksa instansi melakukan proses manajemen keuangan instansi dengan sebaik mungkin. Proses manajemen keuangan instansi yang baik dapat dilakukan oleh stakeholder yang baik pula. Stakeholder yang baik berupa pihak-pihak internal maupun eksternal Instansi yang berperan aktif dalam pengelolaan keuangan instansi. Keaktifan stakeholder akan menunjang proses pengelolaan keuangan instansi yang akan berpengaruh pada jumlah uang yang optimal. Jumlah uang yang optimal seperti uang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh instansi. Jika jumlah uang yang berlebih dapat mengurangi efisiensi dari pengelolaan keuangan instansi, sedangkan jumlah uang yang kurang mengurangi kinerja dari sumber daya lain, seperti kinerja staf, pegawai, pemanfaatan fasilitas instansi dan yang lainnya.

Pengelolaan keuangan instansi didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.dengan penggunaan sumber daya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui instansi. Pemerintah juga sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan melaksanakantugas pokok dan fungsinya berdasarkan aturan yang berlaku. Beberapa tugas pokok tersebut adalah menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Salah satu nirlaba pemerintah yaitu instansi, juga diharuskan untuk mencari sumber keuangan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pelaksanaan realisasi anggaran.prinsip pengelolaan dan instansi guna mencapai kualitas pelayanan instansi yang optimal.

Berdasarkan data LRA tahun 2013 dan 2018 maka peneliti menganalisis data yang didapat dari instansi, ditemukan suatu permasalahan. Masalah tersebut adalah secara keseluruhan masih kurangnya peningkatan realisasi anggaran dalam pelaksanaannya seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Data Daftar Pelaksaaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013-2017

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PENCAPAIAN KINERJA
2013	44,149,501,626.00	39,048,843,994.00	88 %
2014	76,402,141,196.00	65,420,548,991.00	85 %
2015	97,294,453,237.00	81,781,993,534.00	84 %
2016	76,664,779,871.00	70,226,820,131.00	91 %
2017	61.331.758.110	57.935.635.424	94 %
2018	107,805,069,600.00	96.133.425.400.00	89%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah belanja yang dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan yang menunjukkan bahwa adanya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan alokasi anggaran yang telah direncanakan

sebelumnya. Hal ini terlihat bahwa realisasi anggaran tidak pernah terserap atau terealisasi hingga 100%, bahkan pada tahun 2015 mengalami penurunan presentase dengan presentase 84,% dari tahun sebelumnya yang mempunyai presentase 85%. Penyebab terjadinya permasalahan realisasi penyerapan anggaran yang rendah dan penurunan presentase penyerapan anggaran di tahun 2015 dikarenakan oleh beberapa faktor yang dapat disimpulkan oleh penulis dari hasil observasi awal diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya perencanaan yang kurang optimal serta adanya program-program yang belum terealisasi, dibuktikan dengan penyerapan di tahun 2015 yang hanya mencapai 84% dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.02/2015 Pasal 3 Ayat 2
2. Keterlambatan pelaksanaan anggaran atau adanya pelaksanaan anggaran yang tidak tepat waktu yang harusnya selesai pada pertengahan tahun, namun diakhirtahun.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dalam mempertanggungjawabkan keuangan hanya menyajikan Laporan realissi Anggaran saja karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung tidak melakukan penyusunan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan menyebabkan :
 - a) Para pengguna laporan keuangan tidak bisa menilai kemampuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dalam menghasilkan arus kas.

b) Laporan keuangan tidak bisa dipahami oleh pembaca secara luas yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi.

Berdasarkan data dan fenomena diatas, penulis menganggap penting dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa dari tahun 2013-2018 program program atau kegiatan yang ada di dinas perindustrian dan perdagangan belum terealisasikan sepenuhnya dan belum mencapai 100%. Sedangkan dilihat dari kinerjanya belum optimal. Maka berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Barat dan untuk mengetahui seberapa besarnya Pencapaian Kinerja Keuangan pada instansi Pemerintah itu sendiri. Apakah sudah sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat berorientasi secara Efektif, Efisien, dan Ekonomis. Kemudian kriteria penyerapan anggaran diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.02/2015 Pasal 3 Ayat 2 menjelaskan bahwa persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen). persentasi realisasi capaian *output* paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dan laporan keuangan kementerian negara/lembaga berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Melihat berbagai permasalahan yang telah diuraikan diatas, dan perbedaan dari beberapa hasil penelitian, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya penulis membatasi permasalahan-permasalahan menjadi beberapa. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan yang kurang matang. Hal ini dapat dilihat dari penetapan target yang belum berdasarkan data yang terbaru (up to date).
- 2) Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu atau keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang seharusnya selesai di pertengahan tahun, menjadi selesai akhir tahun.
- 3) Penyusunan dan penggunaan anggaran belum optimal. Hal ini dapat terlihat berdasarkan pencapaian program/kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan artinya kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih belum optimal
- 4) Pengelolaan keuangan yang rendah, terbukti dari pegawai pengelolaan keuangan yang masih kurang mampu menyerap anggaran hingga 100%. Hal ini akibat kurangnya pembekalan dalam perencanaan anggaran program kegiatan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam anggaran berbasis kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah?.
- 2) Seberapa besar pengaruh disiplin anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah?.
- 3) Seberapa besar pengaruh keadilan anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah?.

- 4) Seberapa besar pengaruh Efisiensi dan Efektifitas anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah?.
- 5) Seberapa besar pengaruh pendekatan kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah?.
- 6) Seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, dan pendekatan kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah secara simultan?.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh disiplin anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh keadilan anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh pendekatan kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, dan pendekatan kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah secara simultan.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu meliputi hal-hal berikut:

1.5.1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita, khususnya di bidang studi administrasi publik dengan konsentrasi administrasi keuangan publik yang secara khusus mengkaji mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

- a) Hasil penelitian ini untuk memenuhi syarat dalam memperoleh ujian sarjana pada jurusan Administrasi Publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b) Hasil penelitian ini, untuk mengetahui dan membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menganalisis suatu fenomena administrasi publik, khususnya dalam laporan keuangan dan membandingkan dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya dan diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti jadi secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.

Anggaran berbasis kinerja menurut Halim (2007: 177) adalah merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Selanjutnya prinsip-prinsip pokok dalam anggaran menurut Halim (2007:178) antara lain, yaitu:

1) Transparansi dan akuntabilitas

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan

masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan dalam melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.

3. Keadilan anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

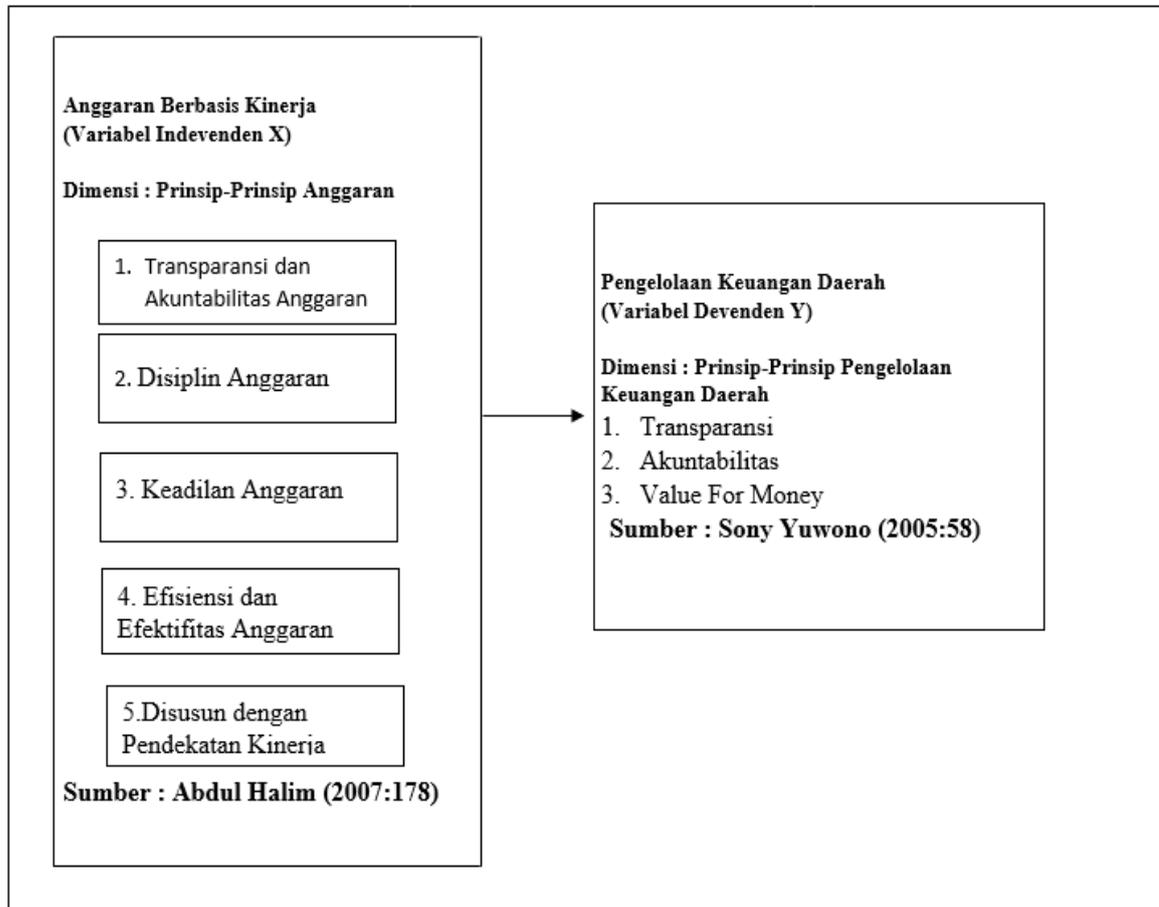
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau infut yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi kinerja yang terkait.

Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Halim dan Iqbal (2012:24).

Sedangkan menurut Yuwono (2005:58) prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*.

Model analisis pada penelitian ini digunakan dalam kerangka berpikir dimana data data biaya aktivitas-aktivitas, laporan kinerja, rencana anggaran tersebut akan diidentifikasi aktivitas-aktivitas dan pemicu aktivitas yang dilakukan oleh suatu instansi. Setelah identifikasi dilakukan maka selanjutnya melakukan analisis varian dengan cara membandingkan antara anggaran dan actualnya. Dari perbandingan dari keduanya akan didapat kesimpulan dimana anggaran yang dilakukan oleh suatu instansi dapat menunjang efektifitas kinerja organisasi. Dibawah ini berikut gambar kerangka pemikiran

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan. Sugiyono, (2012:64). Bentuk hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Sugiyono, (2012:69).

Sedangkan Hipotesis menurut Bungin (2009:92). Hipotesis Penelitian diajukan dalam bentuk pernyataan yaitu sebagai suatu statement terhadap hasil penelitian.

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran dan definisi;definisi yang telah dikemukakan maka hipotesis yang diajukan penulis adalah:

1) Ha :Terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam anggaran Berbasis Kinerja Terhadap pengelolaan Keuangan Daerah di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Ho :Tidak terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

2) Ha :Terdapat pengaruh disiplin anggaran Berbasis Kinerja terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Ho :Tidak terdapat pengaruh disiplin anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

3) Ha :Terdapat pengaruh Keadilan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Ho :Tidak terdapat pengaruh Keadilan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

- 4) Ha :Terdapat pengaruh Efisiensi dan Efektifitas dengan pendekatan kinerja dalam Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
Ho :Tidak terdapat pengaruh Efisiensi dan Efektifitasdengan pendekatan kinerja dalam Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
- 5) Ha :Terdapat pengaruh pendekatan kinerja dalam Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
Ho :Tidak terdapat pengaruh pendekatan kinerja dalam Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
- 6) Ha :Terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, dan pendekatan kinerja terhadap pengelolaan keuangan Daerah secara simultan di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
Ho :Tidak terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, dan pendekatan kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah secara simultan di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.